



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 27 Desember 2024

Nomor : 900/96 /TAPD/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyesuaian RKA SKPD TA. 2025 Sebagai Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025

Yth. Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

di-
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/597/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta hasil pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD TA. 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 24 Desember 2024 perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA. 2025 sebagaimana rincian terlampir.

Dalam hal Hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti, Pemerintah Pusat akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Rancangan APBD TA. 2025 hasil penyempurnaan selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna mendapat nomor register sebagai dasar penetapan Perda tentang APBD TA. 2025. Berkenaan dengan terbatasnya waktu penyampaian dan masih adanya validasi hasil penyempurnaan Ranperda tentang APBD TA. 2025 serta batas waktu penetapan APBD TA. 2025 paling lambat 31 Desember 2024 maka penyesuaian RKA SKPD sudah dapat diselesaikan paling lambat hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 pukul 13.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Lampiran : surat Bupati Kotawaringin Barat
Nomor : 900/96 /TAPD/2024
Tanggal: 27 Desember 2024

DAFTAR PENYESUAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAIMANA
TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
188.44/597/2024

I. Pendapatan Daerah

1. Berdasarkan data tren realisasi PAD, dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dilakukan penyesuaian target PAD terdiri dari:

No.	Uraian	RAPBD	Penyesuaian	Jumlah Pengurangan
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	6.000.000.000	5.000.000.000	-1.000.000.000
2.	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi	2.000.000.000	1.500.000.000	-500.000.000
3.	Ret. Pelayanan Tempat Olahraga	400.000.000	100.000.000	-300.000.000
4.	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1.000.000.000	500.000.000	-500.000.000
5.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.277.548.000	6.000.000.000	-2.277.548.000
				(4.577.548.000,00)

2. Penganggaran target pendapatan pajak rokok menyesuaikan dengan alokasi pajak rokok / Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.916.534.000,00 berkurang sebesar Rp771.466.000,00 dari rancangan APBD TA. 2025 sebesar Rp15.688.000.000,00

3. Dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Strategis Lainnya yang Dibiayai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Penerima Bantuan Keuangan Berbasis Ekologi Tahun 2024, menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp928.000.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/484/2024 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

4. Dalam Rangka Mendukung Efektivitas Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemberian Penghasilan Tetap Kepada Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat Dan Mantir Adat di seluruh lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, menunjuk Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/581.a/BKAD/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 perihal Permintaan Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten/kota, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), untuk Penyaluran Pemberian Penghasilan Tetap Kepada Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat Dan Mantir Adat mulai Tahun Anggaran 2025 yang akan dikelola langsung oleh Kabupaten/Kota.

II. Belanja Daerah

1. Penyesuaian anggaran belanja pegawai untuk penyediaan anggaran jasa tenaga Non ASN sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN (sebagian dialihkan ke honor tenaga Non ASN hingga diangkat menjadi PPPK formasi Tahun 2024) berdasarkan data Non ASN Tahun 2024 serta untuk pelaksanaan audit melalui Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan BLUD Puskesmas TA. 2024.
2. Penggunaan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan program berbasis ekologi tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp928.000.000,00
3. Belanja untuk Pemberian Penghasilan Tetap Kepada Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat Dan Mantir Adat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp42.000.000,00
4. Penyesuaian alokasi anggaran belanja transfer kepada Pemerintah Desa berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari penurunan target retribusi daerah atau berkurang sebesar Rp457.754.800,00
5. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarnya dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
6. Penyesuaian / rasionalisasi anggaran belanja daerah berdasarkan pengurangan target PAD dan DBH pajak rokok sebesar Rp5.349.014.000, terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan dinas pada sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Belanja Perjalanan dinas diluar sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Belanja pada Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)
 - d. Belanja pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - e. Belanja makanan dan minuman rapatdengan rincian rasionalisasi per SKPD sebagaimana tabel berikut:

No	SKPD	Perjadin Rakor	Perjadin Diluar Rakor	Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Kend. Ops	Makan dan Minum
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	14.484.000	13.289.000	7.742.000
2	Dinas Kesehatan	181.568.000	277.799.000	45.859.000	24.773.000	10.384.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.780.000	77.094.000	52.787.000	23.501.000	6.521.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	76.166.000	11.828.000	3.600.000	5.216.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	37.686.000	11.844.000	34.651.000	13.070.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	39.538.000	4.629.000	12.317.000	6.541.000
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.805.000	59.889.000	7.166.000	23.599.000	-
8	Dinas Sosial	-	48.415.000	10.248.000	25.771.000	2.981.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	203.686.000	5.111.000	8.555.000	5.680.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.270.000	136.528.000	14.129.000	11.144.000	12.420.000
11	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	24.030.000	64.949.000	11.043.000	1.295.000	3.774.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	62.753.000	30.002.000	12.222.000	10.017.000	2.724.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.051.000	19.871.000	6.823.000	5.886.000	1.927.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.880.000	145.750.000	8.657.000	4.278.000	10.270.000
15	Dinas Perhubungan	-	31.529.000	9.044.000	38.105.000	3.289.000
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	39.194.000	3.154.000	3.099.000	2.046.000
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.396.000	29.336.000	17.292.000	8.693.000	3.772.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.368.000	27.322.000	11.388.000	11.260.000	2.849.000
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27.503.000	78.029.000	7.521.000	18.101.000	5.924.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.603.000	32.626.000	12.190.000	8.524.000	4.482.000
21	Dinas Pariwisata	12.812.000	66.113.000	6.714.000	4.699.000	2.960.000
22	Dinas Pertanian	59.313.000	8.308.000	9.862.000	18.349.000	46.476.000
23	Sekretariat Daerah	112.297.000	94.563.200	33.669.000	38.340.000	38.184.000
24	Sekretariat DPRD	27.143.000	30.000.000	14.016.000	41.200.000	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	93.705.000	319.617.000	11.508.000	11.314.000	28.665.000
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.294.000	141.049.000	16.836.000	23.983.000	26.211.000
27	Badan Pendapatan Daerah	52.250.000	54.417.000	21.466.000	25.155.000	9.336.000
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.635.000	92.724.000	9.194.000	6.225.000	15.731.000
29	Inspektorat	181.517.000	100.000.000	13.388.000	15.954.000	-
30	Kecamatan Kumai	-	-	5.196.000	7.748.000	7.901.000
31	Kecamatan Arut Selatan	21.651.000	-	10.579.000	12.208.000	10.830.000
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	10.550.000	-	7.494.000	16.928.000	6.390.000
33	Kecamatan Arut Utara	10.918.000	-	7.870.000	4.274.000	5.105.000
34	Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	5.935.000	4.627.000	3.817.000
35	Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-	4.030.000	5.643.000	2.551.000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	24.356.000	6.815.000	3.240.000	7.506.000

Rp. 41.917.000

Pagu Anggaran Belanja Per SKPD Penyempurnaan atas hasil evaluasi Ranperda APBD TA. 2025

No.	Perangkat Daerah	Pagu
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	367.162.697.000
2	Dinas Kesehatan	253.416.144.200
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin	134.814.201.800
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.340.759.900
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72.642.100.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.741.919.200
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.569.811.000
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.707.843.000
9	Dinas Sosial	10.206.427.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.451.246.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.574.748.000
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	20.365.242.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	25.629.169.400
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.820.837.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.989.834.000
16	Dinas Perhubungan	20.238.700.000
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.629.852.000
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.834.924.400
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.953.463.000
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.499.751.000
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.386.248.000
22	Dinas Pariwisata	11.779.591.000
23	Dinas Pertanian	58.694.490.600
24	Sekretariat Daerah	57.462.212.800
25	Sekretariat DPRD	39.596.607.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.734.690.000
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	217.369.067.300
28	Badan Pendapatan Daerah	15.254.919.000
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.534.679.000
30	Inspektorat	21.717.175.300
31	Kecamatan Kumai	8.877.914.000
32	Kecamatan Arut Selatan	19.139.715.000
33	Kecamatan Kotawaringin Lama	7.073.749.000
34	Kecamatan Arut Utara	4.799.360.000
35	Kecamatan Pangkalan Lada	2.830.662.000
36	Kecamatan Pangkalan Banteng	3.078.196.000
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.609.759.000
		1.707.528.704.900

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BUDI SANTOSA